

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Geografi Sosial

Geografi sosial adalah subdisiplin geografi yang mengaitkan ilmu-ilmu alam dan sosial, meliputi topik mulai dari tektonik sampai psikoanalisis. Ruang lingkupnya meliputi lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Geografi sosial secara umum mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta dampak lingkungan terhadap manusia. Geografi sosial memiliki tiga unsur yaitu manusia, relasi, dan lingkungan alam. Sementara unsur utamanya adalah interelasi serta interaksi antara manusia dan lingkungan hidup. Nasobi Niki Suma & Hendra Pratama, (2023)

Geografi sosial adalah ilmu yang bertugas dengan menelaah pengaruh lingkungan alam atas manusia dalam arti kehidupannya, aktivitasnya, kemajuan serta penyebarannya, dan juga menelaah kemampuan manusia dalam mempengaruhi lingkungan alam melalui kemampuan ilmu dan teknologi yang dimilikinya. Geografi sosial ini dapat didefinisikan sebagai suatu studi tentang alam, persebaran, hubungan antar kondisi geografis dan aktivitas manusia serta lingkungannya dengan melakukan hubungan manusia dengan lingkungan alam mencerminkan tingkat penyesuaian atau adaptasi manusia dengan lingkungan sekitarnya, yang dalam kehidupan sehari-hari dilihat sebagai “*Cultural landscape*”. (Sunarti, 2019).

2.1.2 Geografi Penduduk

Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia Menurut (Ningrum & Goma, 2022) aspek spasial dari penduduk. Objek studi ini meliputi penyebaran, kepadatan, perbandingan, jenis kelamin, perbandingan manusia dengan luas tanah, dan lain-lain. Pada geografi penduduk manusia

akan dianalisis karakteristik-karakteristiknya analisis ini berhubungan dengan segala aspek keruangan. Menurut *Oxford Dictionary of Human Geography* (Alisdair Rogers, Noel Castree, 2013) geografi kependudukan merupakan suatu cabang geografi yang “*Focuses on the characteristics of population distribution that change in a spatial context*”. yang intinya adalah dengan menjelaskan tentang karakteristik populasi dan distribusinya yang berubah-ubah dalam konteks spasial. Sejalan dengan penjelasan geografi penduduk tidak hanya mempelajari manusia sebagai fenomena. Tetapi, manusia dianggap sebagai variabel yang berdiri bersama dan saling berinteraksi dengan sekitar dalam satu wilayah. Geografi penduduk merupakan salah satu cabang dari geografi manusia, yang objek kajiannya yaitu aspek keruangan penduduk. Konsep geografi penduduk adalah suatu unsur yang paling penting dalam memahami fenomena ataupun kejadian geografi (alam maupun sosial). Konsep geografi penduduk selalu berkaitan dengan persebaran, hubungan, fungsi, bentuk, pola, dan proses terjadinya. Konsep geografi yang diambil untuk menjelaskan fenomena kependudukan, antara lain:

1. Pola, berkaitan dengan fenomena kependudukan mengenai permukiman yang dihuni oleh penduduk, pola permukiman berbentuk memanjang jalan radial, tersebar, memanjang pantai, dan juga sejajar dengan rel kereta.
2. Morfologi, menjelaskan mengenai struktur luar dari batuan yang menyusun bentuk morfologi permukaan bumi (dataran rendah, dataran tinggi, pantai, pegunungan, dll)
3. Interaksi dan interdependensi, keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Dalam fenomena kependudukan, interaksi sangatlah diperlukan.

2.1.3 Teori Ketimpangan Struktural

Kemiskinan perkotaan dianggap sebagai fenomena yang semakin tampak akibat dampak dari transformasi masyarakat, khususnya urbanisasi. Pola, tren, dan karakteristik urbanisasi telah digambarkan sebagai hal yang mengkhawatirkan oleh beberapa perencanaan kota. Konsentrasi organ ekonomi, sosial, politik, dan administrasi suatu negara atau wilayah di kota-kota telah menjadikan kota sebagai magnet bagi masyarakat pedesaan, terutama rumah tangga miskin yang mencari standar hidup yang lebih baik.

2.1.4 Teori Konsentris

Teori konsentris ini merupakan hasil telaah buges atas dasar struktur kota besar *Chicago* pada tahun 1920-an. Buges mengemukakan gagasan bahwa kota-kota itu memekarkan diri bermula pada pusat aslinya, sehingga nantinya akan datang penduduk secara bertahap dan akan meluas ke wilayah tepi atau suatu kota berkembang dari pusat ke bentuk zona konsentris secara berjenjang.



Sumber: (Yunus, 2000)

**Gambar 2. 1 Teori
Konsentris**

dari gambar diatas penjelasannya sebagai berikut:

1. Daerah pusat kegiatan atau *central business district* (CBD) yaitu daerah yang merupakan pusat segala kegiatan seperti ekonomi, Pendidikan, pemerintahan
2. Daerah peralihan (*transition zone*), zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan karena perdagangan dan industri dari zona 1 banyak mengambil alih daerah permukiman sehingga pengambilan alih tersebut yang terjadi selama terus menerus sehingga menyebabkan permukiman kumuh.
3. *Low-class residential homes*, zona ini berfungsi sebagai permukiman bagi pekerja pabrik industri diantaranya adalah pendatang baru dari zona 2.
4. *zone of better resident*, zona ini banyak dihuni oleh penduduk berstatus ekonomi menengah hingga tinggi.
5. Zona penglaju atau *commuter zone*, zona ini merupakan suatu akibat adanya proses desentralisasi permukiman sebagai dampak sekunder dari teknologi di bidang transportasi. (Yunus, 2000)

2.1.5 Permukiman dan Perumahan

2.1.5.1. Permukiman

Permukiman dapat diartikan sebagai tempat bermukim manusia yang menunjukkan tujuan tertentu seperti memberikan kenyamanan pada penghuninya termasuk orang yang datang ke tempat tersebut, sehingga permukiman merupakan suatu kesatuan wilayah suatu rumah berada, permukiman merupakan suatu kesatuan unsur tempat tinggal yang didalamnya ruang yang lebih kecil dari yaitu perumahan, lingkungan, dan masyarakat. Sunarti, (2019). Sedangkan Permukiman menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar Kawasan lindung, baik di Kawasan pedesaan atau perkotaan yang berfungsi sebagai

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. (Ervianto & Felasari, 2019)

Kawasan permukiman memiliki peran sebagai areal tempat tinggal ataupun hunian yang dapat menunjang segala aktivitas. Kawasan permukiman di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dengan berjalannya kebijakan percepatan pembangunan nasional, peningkatan tersebut berdampak terhadap kebutuhan perumahan dan permukiman. Seperti yang di jelaskan di awal bahwa permukiman penduduk muncul untuk penduduk mendirikan sebuah bangunan yang berguna untuk menunjang segala aktivitas serta sebagai tempat berlindung serta bertambahnya jumlah penduduk akhirnya berkembang menjadi permukiman.

Permukiman sendiri terbentuk dari kesatuan isi dan wadah, isi merupakan manusia yang merupakan penghuni dan wadah merupakan lingkungan huniannya kedua hal tersebut akan membentuk komunitas yang secara berjalan waktu akan membentuk suatu permukiman. Batas dari permukiman biasanya berupa batas geografi yang berada di permukaan bumi, seperti wilayah atau benua yang dipisahkan oleh lautan. Permukiman memiliki isi dan wadah didalamnya juga terdapat beberapa unsur yang menyusun diantaranya:

1. Alam

- a. Geologi

Merupakan kondisi batuan dimana permukiman berada setiap permukiman memiliki sifat dan karakter geologinya yang satu dengan yang

lainnya karena memiliki kondisi dan letak geografis yang berbeda.

b. Topografi

Merupakan kemiringan suatu wilayah yang ditentukan oleh letak dan kondisi geografis wilayah tersebut.

c. Tanah

Tanah berfungsi sebagai media untuk meletakkan sebuah bangunan (rumah) dan menanam tanaman untuk menopang kehidupan.

d. Air

Air merupakan sebuah objek vital sumber utama kehidupan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainya seperti hewan dan tumbuhan.

2. Manusia

Manusia sebagai pelaku utama kehidupan selain hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya, manusia membutuhkan berbagai hal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan biologis seperti ruang, udara, dan lain-lain.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sebuah kelompok manusia yang berada dalam suatu permukiman yang membentuk suatu komunitas. Suatu masyarakat di dalamnya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di dalam suatu permukiman diantaranya:

- a. Kepadatan dan komposisi penduduk
- b. Adat dan kebudayaan
- c. Kelompok sosial
- d. Pengembangan ekonomi
- e. Pendidikan

f. Kesehatan

g. Hukum dan administrasi

4. Bangunan (Rumah)

Bangunan atau rumah merupakan wadah bagi manusia (keluarga). Pada dasarnya rumah atau bangunan ini dapat digunakan sepanjang operasional kehidupan manusia.

2.1.5.2. Perumahan

Pengertian perumahan secara umum adalah gabungan dari beberapa rumah, baik yang dikembangkan pemerintah maupun swasta dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang akan terus berlanjut dan meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, dinamika kependudukan, dan tuntutan ekonomi yang berkembang, kehadiran perumahan ini merupakan aspek penentu dari keberlanjutan perkotaan hal ini dapat terjadi karena sebagian besar struktur lingkungan perkotaan terdiri perumahan. (Sunarti, 2019)

Perumahan adalah salah satu syarat dalam lingkungan perumahan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 534/KPTS/M/2001 (Dina Puspita & Djoko Suwandono, 2014) bahwa lingkungan perumahan yang ada harus mengikuti standar pelayanan minimum (SPM) yaitu:

1. Jalan

- Jalan lingkungan ketentuan Panjang 40 – 60 M dengan lebar 2 – 5 M
- Jalan setapak, ketentuan Panjang 50 – 110 M dengan lebar 0,8 – 2 M

2. Air limbah / Sanitasi

- 80% dari jumlah penduduk telah memiliki sarana sanitasi seperti toilet, MCK dan septik tank. Terdapat separasi antara mandi, cuci, dan kakus

3. Drainase

- Wilayah yang tidak ada genangan banjir
- Terdapat drainase selokan
- Drainase mampu menampung air

4. Persampahan

- 80% dari jumlah penduduk dilayani oleh sistem DK/PDK
- Tidak ada pembuangan sampah secara liar

5. Air bersih

- Penduduk yang terlayani 55 – 75%
- Memenuhi standar air bersih yaitu tidak berwarna, berbau, dan berasa.

6. Niaga

- Setidaknya di setiap kecamatan tersedia 1 pasar untuk setiap 30.000 penduduk dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Selain itu pasar tersebut juga mudah diakses
- Terdapat toko/warung dengan pelayanan 250 jiwa/unit
- Aksesibilitas menuju sarana niaga/perdagangan mudah

7. Kesehatan

- Jangkauan wilayah kabupaten/kota minimal tersedia 1 unit balai pengobatan/3.000 jiwa.
- Aksesibilitas mudah.

8. Pendidikan

- Minimal tersedia TK, SD, SMP, SMA.

- TK melayani 1.250 jiwa/unit, SD 1.600 jiwa/unit, SMP dan SMK/SMA melayani 4.800 jiwa/unit.

9. Ruang terbuka hijau

- Satuan wilayah kabupaten/kota setidaknya tersedia taman lingkungan untuk setiap 250 jiwa, taman kecamatan untuk setiap 120.000 jiwa, taman lingkungan (RW) untuk setiap 2.500 jiwa.
- Taman yang tersedia bersih, nyaman dan terawat.

2.1.6 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan permukiman Permukiman kumuh (*slum area*) adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk perumahan, baik secara teknis maupun nonteknis. (Tjuk, 2005) menyatakan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman dengan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas konstruksi yang rendah, sarana dan prasarana permukiman yang minimum memadai merupakan akibat dari kemiskinan. Keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan penduduk kurang mampu (kurangnya pendapatan), maka menyebabkan warga atau penduduk tersebut akan menempati lahan-lahan ilegal dan membentuk kawasan-kawasan kumuh (permukiman kumuh dan liar) dan berkembang berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang dianggap rendah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penyakit masyarakat (*pathology social*) yaitu suatu bentuk penyimpangan perilaku manusia akibat dari keadaan lingkungan yang sudah tidak mendukung lagi (Ridlo, 2011).

Kawasan permukiman kumuh adalah salah satu sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Kawasan ini berada di pusat Kota Jakarta Timur ada beberapa titik yang diikut sertakan dalam program pemerintah dalam revitalisasi berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan indikator-indikator mengenai Kawasan kumuh, diantaranya:

1. Kurangnya Pelayanan Dasar

Penghuni kawasan kumuh memiliki keterbatasan atau bahkan tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti fasilitas sanitasi, sumber air bersih, sistem pengumpulan atau pengelolaan sampah, drainase.

2. Rumah Tidak Layak Huni

Kondisi rumah yang tidak layak huni dapat diartikan sebagai rumah yang dibangun dengan material nonpermanen, selain itu rumah tidak layak huni juga dapat dilihat dari sisi ukuran hunian dimana standar minimum luasan bagi satu orang dari beberapa Lembaga di Indonesia berbeda-beda, ada yang 7,2 M ada pula yang 9 M

3. Permukiman Dengan Tingkat Kepadatan Tinggi

Kepadatan yang dimaksud dalam hal ini adalah banyaknya bangunan rumah yang terdapat pada suatu kawasan kumuh. Hal ini akan menunjukkan betapa sempitnya ruang yang tersedia bagi tiap orang. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, kepadatan yang tergolong tinggi adalah sebesar > 100 bangunan/ha dengan kepadatan penduduk > 200 jiwa/Km.

4. Kondisi Hidup yang Tidak Sehat dan Lokasi yang Berisiko

Kawasan kumuh identik pula dengan kondisi penduduk yang tidak sehat. Dalam hal ini dapat dimaknai dengan lingkungan

permukiman penduduk yang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga berdampak pada kerentanan terhadap kesehatan penduduk. Disisilain, Kawasan ini juga terbangun di lokasi yang cukup berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan penghuninya seperti Kawasan pinggir sungai, Kawasan dekat tanah yang rawan longsor, dan sebagainya dimana hal ini riskan terhadap keselamatan jiwa.

5. Ketiadaan Jaminan Hak Bermukim

Pembangunan Kawasan kumuh secara spontan dan illegal menyebabkan Kawasan tersebut terbilang tidak aman. Ketidakamanan disini adalah ketiadaan jaminan hak bermukim yang seaktu-waktu penghuninya akan mengalami penggusuran seperti yang kerap dilakukan di lokasi kota-kota berkepadatan tinggi.

6. Kemiskinan dan Eksklusi Sosial

Salah satu hal yang penting untuk dibicarakan dalam permasalahan Kawasan kumuh adalah hubungan dengan kemiskinan dan tindakan eksklusi sosial dari luar Kawasan kumuh, sudah jelas bahwa hampir sebagai besar, bahkan keseluruhan penghuni Kawasan kumuh merupakan masyarakat yang tidak bisa atau tidak ingin lepas dari lingkaran setan kemiskinan dan cenderung berputar tanpa adanya pemutusan rantai. (Ardila Susi dkk 2021)

2.1.6.1. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

Adanya permukiman kumuh disebabkan oleh banyak faktor. Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kawasan permukiman kumuh, antara lain ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan dalam pemenuhan rumah layak huni, urbanisasi, ekonomi, sosial

budaya, lahan perkotaan, sarana dan prasarana tidak memadai, tata ruang, daya tarik perkotaan, serta status kepemilikan bangunan dan lama tinggal penghuni. (Araujo dkk., 2023.)

Menurut (Putri & Ridlo, 2023) Terjadinya permukiman kumuh perkotaan disebabkan oleh berbagai macam faktor dari berbagai macam faktor tersebut dapat diketahui penyebab terjadinya permukiman kumuh antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor geografi, faktor fisik lingkungan

1. Faktor ekonomi
2. Faktor geografi dan lingkungan
3. Faktor psikologi
4. Faktor fisik lingkungan

2.1.6.2. Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh

Kondisi kumuh sebenarnya masih bisa berubah jika partisipasi semua pihak dalam upaya mengurangi kawasan permukiman kumuh menurut (Juita dkk., 2018) mengemukakan partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Partisipasi yang dimaksud disini adalah partisipasi keterlibatan anggota atau masyarakat dalam segi pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) Program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal (Sedubun dkk., 2023)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu merupakan peningkatan

kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga (multi pihak), dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat secara terpadu

2.1.6.3. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018 dalam (Putri & Ridlo, 2023) terkait peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, penanganan permukiman kumuh meliputi:

1. Pemugaran

Pemugaran dapat dilakukan dengan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mengembalikan fungsi yang semula. Pemugaran dapat dilakukan melalui perbaikan atau pembangunan kembali permukiman kumuh agar layak huni

2. Peremajaan

Peremajaan dilakukan dengan cara mewujudkan kondisi permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Pola penanganan peremajaan dilakukan pada lokasi yang memiliki status kekumuhan berat dan sedang.

2.1.7 Kondisi Sosial Ekonomi

Sosial mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, sementara itu ekonomi memiliki artian sebagai ilmu yang berhubungan dengan asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta kekayaan. Menurut Lontoh (2006) dalam (Khalida & Sjaf, n.d.) Sekilas sosial dan ekonomi seperti dua hal dan cabang ilmu yang berbeda, namun diantaranya keduanya terdapat keterkaitan yang erat. Salah satu kaitan yang erat tersebut adalah jika keperluan ekonomi tidak terpenuhi maka akan terdapat dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa sosial ekonomi mengandung pengertian sebagai segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan.

Kondisi Sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup seperti, sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan hidup ini erat kaitannya dengan penghasilan seseorang, bahwa kedudukan sosial ekonomi seseorang dapat dilihat berdasarkan pekerjaan, penghasilan dan pendidikan sehingga masyarakat tersebut dapat digolongkan ke dalam kedudukan ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Oleh karenanya faktor sosial ekonomi ini menjadi salah satu faktor penentu baik atau buruknya suatu kualitas permukiman di suatu daerah. (Nurmansyah & Marwasta, n.d.)

Menurut (Hanum, 2018) kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari keadaan atau kondisi sosial ekonomi keluarga. Kondisi sosial ekonomi keluarga merupakan kondisi setiap keluarga dalam masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang dinilai akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Kondisi sosial ekonomi yang dilihat dari pendapatan memberikan dampak bagi kesejahteraan. Pendapatan yang diterima individu atau

keluarga secara umum bersumber dari hasil pekerjaan yang dilakukannya. Selain pendapatan, kondisi sosial ekonomi keluarga dapat diketahui dari jumlah anggota keluarga, jumlah anggota dalam sebuah keluarga memberikan dampak juga terhadap kesejahteraan keluarga. Semakin besar jumlah anggota dalam sebuah keluarga semakin besar tingkat kebutuhan, dan bila pendapatan tidak mendukung akan memberikan dampak kurang sejahteranya keluarga karena tidak mencukupi kebutuhan dalam keluarga.

Menurut (Basir, 2012) isu tentang Kawasan kumuh perkotaan ada 3 hal (1) berdasarkan dimensi fisik, kawasan kumuh mengindikasikan tata ruang yang mengganggu keindahan kota; (2) berdasarkan dimensi sosial ekonomi, kawasan kumuh menggambarkan penduduk kota yang miskin dan terbelakang; (3) berdasarkan dimensi moral, kawasan kumuh menjadi basis kriminalitas, kenakalan remaja dan perilaku menyimpang. Kondisi sosial permukiman kumuh merupakan kawasan yang berada pada wilayah perkotaan yang memiliki penduduk yang miskin, sehingga para penduduk yang tinggal di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang mencukupi ataupun kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Karena ketidakmampuan masyarakat dalam ekonomi untuk mendapatkan rumah yang layak huni, sebagian masyarakat yang bermukim pada kawasan permukiman kumuh merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah, dengan kondisi perekonomian yang rendah kemampuan masyarakat untuk mendirikan bangunan guna tempat tinggal dengan kondisi seadanya agar bertahan hidup di kawasan perkotaan.

Menurut Ria (2017) dalam (Khalida & Sjaf, n.d.) kondisi sosial ekonomi merupakan suatu usaha dari masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup serta dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan beberapa

parameter untuk kondisi sosial ekonomi, antara lain usia, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Jadi kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat terutama dalam kaitannya untuk mencapai kesejahteraan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dibawah ini terdapat tabel yang berisikan beberapa penelitian terdahulu baik skripsi maupun jurnal yang dimiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan

No	Aspek	Penelitian 1 (Jurnal)	Penelitian 2 (Skripsi)	Penelitian 3 (skripsi)	Yang Akan Diteliti
1	Penulis	Nur Hayati	Dewi Nelly Simanuntalk	Windi Saputri Prastini	Mukhammad Rizky Nugroho
2	Judul	Penataan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya	Analisis Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan	Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Pada Kawasan Cipanyir (Cipedes- Panyingkiran) Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya	Karakteristik Permukiman Kumuh di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur
3	Tahun	2020	2022	2023	2025
4	Lokasi	Kota Tasikmalaya	Medan Belawan	Kota Tasikmalaya	Kota Jakarta Timur
5	Rumusan Masalah	Bagaimana karakteristik		Bagaimana bentuk	Bagaimana karakteristik

		permukiman kumuh di kelurahan cilembang kecamatan cihideung kota tasikmalaya Bagaimana program kota tanpa kumuh (kotaku) dalam penanganan permukiman kumuh di kelurahan cilembang kecamatan cihideung kota tasikmalaya		partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku) di kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cepedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya	permukiman kumuh di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Bagaimana kondisi ekonomi permukiman kumuh Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara kota Jakarta Timur
6	Metode	Deskriptif kuantitatif	Deskriptif	kuantitatif	Deskriptif Kuantatif

Sumber: Hasil Studi Pustaka

2.3 Kerangka Konseptual

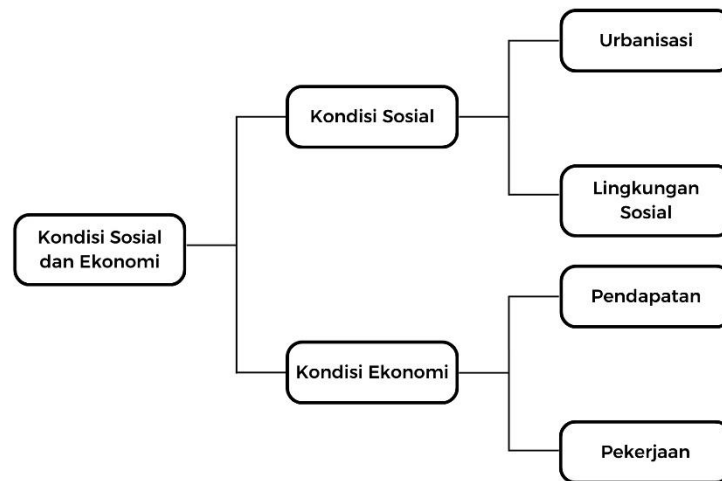
Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah dan di dukung tinjauan teoretis maka dapat dibuat kerangka konseptual yang di tunjukan untuk menganalisis karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur

1. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dapat dilihat dari karakteristik bangunan, sarana dan prasarana, dan kondisi lingkungan



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual I

2. Bagaimana kondisi ekonomi permukiman kumuh Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dapat dilihat dari kondisi Pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.



Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual II

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang di gunakan sebagai jawaban atau dugaan sementara pada permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dapat dilihat dari kurangnya pelayanan dasar, rumah tidak layak huni, permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi, kondisi hidup yang tidak sehat, ketiadaan jaminan bermukim.
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dapat dilihat dari kondisi sosial: urbanisai, lingkungan sosil kondisi ekonomi: pendapatan, dan pekerjaan